

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Akibat pandemi covid-19 ini perekonomian masyarakat Indonesia terus mengalami penurunan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, bahwasanya pada kuartal II 2020 terjadi penurunan sebesar 5,32 persen terhadap kuartal I tahun 2020, yang sebelumnya hanya 2,97 persen, menurun sebesar 5,02 persen terhadap tahun 2019. Hal tersebut menyebabkan merosotnya kegiatan perekonomian dan berakibat menurunkan kesejahteraan masyarakat, (Kompas.Com. 11 Agustus 2020).

Untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan segala upaya, salah satunya memberikan BLT-Dana Desa. Syarat dan ketentuan serta teknis serta pendataan sampai pelaksanaan BLT-DD sudah tertera dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu dengan memperbolehkan desa memberikan BLT kepada masyarakat terkategori kurang mampu.

Pada tahun 2019 Pemerintah dan seluruh komponen di seluruh dunia dihadapkan dengan pandemi covid-19 yang berdampak disegala aspek kehidupan, terutama pada aspek ekonomi masyarakat. Mewabahnya covid-19 telah menciptakan tantangan yang belum pernah ada didunia. Di Indonesia, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari satu juta orang sejak kasus pertama yang terkonfirmasi di bulan Maret 2020 dan menelan puluhan ribu korban jiwa. Covid-19 yang menghambat kegiatan perekonomian dan masyarakat terus menimbulkan dampak mengejutkan terhadap pembangunan manusia. Setelah mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, kemiskinan kini meningkat lagi.

Untuk menanggapi krisis tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan

paket stimulus fisik melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Indonesia adalah salah satu dari lima negara di kawasan Asia Pasifik dengan alokasi terbesar untuk memerangi Covid-19.

Di tahun 2020 Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.699 triliun untuk program tersebut. Mengingat krisis masih berlangsung, pemerintah mengumumkan pemberian anggaran sebesar Rp.699 triliun di bulan Februari 2021 untuk melanjutkan program PEN tahun 2021 (Herdiana et al., 2021).

Di Indonesia, munculnya covid-19 pada awal tahun 2020, pada mulanya hanya segelintir orang yang saja yang terpapar kasus tersebut, namun seiring berjalannya waktu kasus corona virus tersebut melonjak, oleh karena itu banyak upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak dari pandemi covid-19 tersebut.

Salah satu upaya yaitu dengan diterapkannya kebijakan *social distancing* dan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) demi memutus rantai penyebaran virus tersebut. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi berbagai kegiatan diluar rumah, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga sangat berdampak terhadap ketahanan ekonomi bagi rumah tangga yang berkategori kurang mampu(miskin).

Dengan adanya pandemi covid-19 tidak hanya membawa keterpurukan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menambah beban yang miskin semakin miskin dan memperparah tingkat kemiskinannya. Pada bulan maret tahun 2020 merupakan indikisasi awal adanya dampak kasus corona pada tingkat kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia.

Badan Pusat Statistik melakukan survei pada bulan maret 2020 bahwasanya kemiskinan terus mengalami kenaikan pada level 9,78%. Angka ini jelas

mengalami kenaikan sebesar 0,57% poin dari kondisi awal pada bulan September tahun 2019 sebanyak 0,37% poin dari kondisi bulan maret 2019. Secara absolut jumlah masyarakat miskin pada tahun 2020 meningkat sebanyak 1,63 juta jiwa menjadi 26,42 juta jiwa terhadap September 2019. Peningkatan ini sangat signifikan dibandingkan dengan kasus awal yang terjadi pada bulan maret 2015. Angka kemiskinan kian bertambah sebesar 0,86 juta jiwa dibandingkan dengan kondisi awal pada September 2014 (Detiknews, 28 Juli 2020).

Keluarga yang kurang mampu yang dimaksud dalam permendes tersebut adalah orang yang tergolong kedalam orang miskin baru atau orang yang memang terkena dampak pada saat masa pandemi covid tersebut, kemudian orang yang belum pernah terdata pada penerima bantuan apapun dari pemerintah, baik itu tunai maupun non tunai.

★ Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa Paling banyak 35% dari Pagu Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan pada tahun 2020. Bila anggaran tersebut tidak mencukupi, kepala Desa dapat menggunakan dana desa melebihi batasan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Apabila pemerintah Desa tidak menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa akan dikenakan sanksi berupa penghentian Dana Desa Tahap III Tahun berjalan. Bagi Desa yang statusnya Desa Mandiri akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa agar segera mungkin mendistribusikan BLT secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan proses secara administratif.

Kecamatan Bunguran Utara adalah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten

Natuna yang memiliki Luas 19.493,11 km², dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.472 jiwa(Data Sensus Penduduk BPS Natuna 2020). Kecamatan Bunguran Utara memiliki desa yang berjumlah sebanyak 8 desa dengan masing-masing sudah menerima dana desa dengan jumlah anggaran yang berbeda. Berikut adalah data jumlah penduduk dan besaran dana desa yang diterima disetiap masing-masing desa diwilayah Kecamatan Bunguran Utara berdasarkan data bps dan peraturan bupati pada tahun 2020.

Tabel 1.1.Jumlah Penduduk dan Dana Desa Se-Kecamatan Bunguran Utara 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk(Jiwa)	Jumlah Dana Desa
1	Kelarik Barat	458	Rp 1.017.477.000
2	Kelarik	935	Rp 824.726.000
3	Kelarik Utara	893	Rp 829.121.000
4	Kelarik Air Mali	690	Rp 1.304.668.000
5	Teluk Buton	451	Rp 843.166.000
6	Belakang Gunung	322	Rp 1.001.448.000
7	Seluan Barat	297	Rp 759.681.000
8	Gunung Durian	426	Rp 934.176.000

Sumber: Data BPS dan Perbub Tentang Dana Desa Kab.Natuna 2020(telah diolah kembali).

Kecamatan Bunguran Utara adalah daerah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Nelayan, Petani, dan Buruh Kasar yang mana pendapatannya tidak menentu tergantung pada musim, dan juga terdapat banyak masyarakat yang dikategorikan kurang mampu di desa diwilayah Kecamatan Bunguran Utara. Dan untuk buruh kasar pada pekerjaan proyek bangunan yang dilakukan di lakukan oleh Desa. Kecamatan Bunguran Utara terdiri dari 8 Desa, yaitu Desa Kelarik, Desa Kelarik Utara, Desa Kelarik Barat, Desa Kelarik Air Mali, Desa Seluan Barat, Desa Belakang Gunung,dan Desa Teluk Buton (Sensus Penduduk BPS Natuna, 2020)

Bisa kita lihat dari data diatas bahwa desa Kelarik merupakan bagian desa

diwilayah Kecamatan Bunguran Utara dengan jumlah penduduk terbanyak, yang dimana jumlah penduduk di Desa Kelarik berjumlah 924 Jiwa. Walaupun desa kelarik memiliki jumlah penduduk terbanyak dari desa lain di wilayah Kecamatan Bunguran Utara, akan tetapi Desa Kelarik justru mendapatkan Dana Desa yang sama bahkan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan Desa yang lain di wilayah Kecamatan Bunguran Utara yang jumlah penduduknya lebih sedikit.

Pada masa Pandemi Covid-19 Desa Kelarik juga mendapatkan dampak, oleh karena itu untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah melaksanakan upaya dengan BLT-Dana Desa , dimana Desa Kelarik juga merupakan Desa yang mendapatkan bantuan dan Program BLT untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pemberian BLT ini dapat membantu perekonomian rumah tangga di masa pandemi. Program BLT untuk pandemi covid ini adalah program bantuan yang bersumber dari dana desa yang telah dianggarkan pada tiap-tiap desa.

Namun dikarena dana desa yang dianggarkan untuk desa kelarik itu terbilang sedikit dari desa-desa lain sedangkan jumlah penduduknya lebih banyak, maka akan ada kebingungan dari pemerintah desa Kelarik untuk menyalurkannya secara meluas dan merata, sedangkan pada saat pandemi covid 19 masyarakat sangat membutuhkan program bentuk bantuan baik itu tunai maupun non tunai. Hal ini bisa membuat masyarakat juga merasakan keresahan dan timbulnya kecurigaan kepada pemerintah desa sebagai penyalur bantuan BLT untuk penanganan pandemi covid-19.

Kemudian dikarenakan pembagian BLT ini sudah ditetapkan jumlah anggaran yang boleh dianggarkan desa yaitu paling banyak 40 persen dari anggaran dana desa, namun dengan dana desa yang terbatas maka hal tersebut bisa menimbulkan masalah berupa konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa

karena masyarakat menganggap adanya ketidaksesuaian dalam penilaian untuk pemberian penerima manfaat dari program BIT ini.

Sesuai informasi yang didapatkan dari Seketaris Desa Kelarik melalui Telepon pada tanggal 25 Januari 2022, bahwa Kriteria penerima BLT Desa Kelarik adalah seperti, Masyarakat lanjut usia, masyarakat yang hilang Pekerjaan, dan Masyarakat yang terdampak Covid 19, Sedangkan untuk mekanisme cara penilaian adalah dengan melakukan survei lalu dimusyawarahkan pada Musyawarah Desa Khusus. Namun pada kenyataannya pada penyaluran bantuan BLT pertama pada tahun 2020 adanya protes dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa ada orang yang terkategori mampu yang juga mendapatkan bantuan BLT untuk covid-19 ini dan justru ada orang yang kurang mampu yang belum mendapatkan program pemerintah apapun tapi justru tidak mendapatkan bantuan berupa BLT ini.

Pada Tahun 2020 Desa Kelarik mengalokasikan Dana Desa untuk BLT yaitu senilai Rp278.500.000,00 dengan 103 Penerima yaitu dari Bulan April sampai dengan Agustus. Berikut adalah data jumlah alokasi Dana Desa untuk BLT dan jumlah penerima BLT tahun 2020:

Tabel.1.3. Data Alokasi Dana Desa dan Jumlah Penerima manfaat BLT Desa Kelarik Tahun 2020

Jumlah Alokasi	Jumlah Penerima	Bulan	Nominal/Penerima
Rp278.500.000,00	103	A Pril	Rp600.000,00
		Mei	Rp600.000,00
		Juni	Rp600.000,00
		Juli	Rp300.000,00
		Agustus	Rp300.000,00
Total			Rp247.200.000,00

Sumber: Data Kantor Desa Kelarik Tentang Alokasi Dana Desa untuk BLT dan jumlah Penerima Manfaat BLT Desa Kelarik Tahun 2020 (telah diolah kembali).

Kemudian pada tahun 2021 Desa Kelarik kembali mengalokasikan Dana Desa untuk BLT sebesar Rp407.300.000,00 dengan jumlah Penerima sebanyak 113 Keluarga penerima manfaat.dari bulan Januari sampai dengan Desember. Berikut adalah data jumlah alokasi Dana Desa untuk BLT dan jumlah Penerima BLT tahun 2021:

Tabel.1.4. Data Alokasi Dana Desa dan Jumlah Penerima manfaat BLT Desa Tahun 2021

Jumlah Alokasi	Jumlah Penerima	Bulan	Nominal/Penerima
Rp407.300.000,00	113	Maret	Rp300.000,00
		April	Rp300.000,00
		Mei	Rp300.000,00
		Juni	Rp300.000,00
		Juli	Rp300.000,00
		Agustus	Rp300.000,00
		September	Rp300.000,00
		Oktober	Rp300.000,00
		November	Rp300.000,00
		Desember	Rp300.000,00
		Total	

Sumber: Data Kantor Desa Kelarik Tentang Alokasi Dana Desa untuk BLT dan jumlah Penerima Manfaat BLT Desa Kelarik Tahun 2021 (telah diolah kembali).

Dari uraian diatas, ada timbul keinginan dan ketertarikan dikarena jumlah penduduk Desa Kelarik yang terbilang paling banyak diwilayah Kecamatan Bunguran Utara dengan Dana Desa yang Kecil dari Desa lain diwilayah Kecamatan Bunguran Utara, yang akan menimbulkan konflik. Dan Pemerintah Desa harus menjalankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi untuk kelangsungan dan penanganan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah ‘Meminimalisir Konflik Pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran

Utara Kabupaten Natuna''

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan di penelitian ini adalah Bagaimana ketegangan masyarakat dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai(BLT) dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Kelarik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketegangan masyarakat dalam penyaluran Bantuan langsung tunai desa dalam penanganan pandemi covid-19 di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu sebagai sumber informasi tentang bagaimana ketegangan masyarakat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai(BLT) Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara.

1.2.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan informasi dalam penelitian dan memberikan informasi terkait ketegangan masyarakat dalam pembagian BLT pada penanganan masyarakat di masapandemi covid-19.

1.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan

dan pemikiran serta memberikan informasi kepada masyarakat ramai tentang. Bentuk ketegangan masyarakat dalam pembagian BLT Desa terkhusus pada masa pandemi covid-19 ini.

